

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan

Risal Adriawan¹, Abdul Rahman^{2*}, Baso Iwang³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin, Makassar.

*Email: abdul.rahman1582@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efek desentralisasi fiskal kepada kemiskinan yang ada di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. objek dari penelitian ini yaitu data indeks kedalaman kemiskinan (P1), Pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi khusus (DAK) serta indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan rentang waktu dari tahun 2011 hingga dengan tahun 2020. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel, dengan memilih model terbaik berasal ketiga model regresi data panel yaitu common effect model, fixed effect model serta random effect model. Model yang terpilih dari Uji Hasumant adalah fixed effect model. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 13,6 persen. Dengan menggunakan fixed effect model yang diolah menggunakan program RStudio memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (DAK) dan Kemiskinan mempunyai arah negatif dan pengaruhnya signifikan, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Tingkat Kemiskinan mempunyai arah hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemiskinan memiliki arah yang negatif dan pengaruh yang tidak signifikan.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal; pendapatan asli daerah; dana alokasi umum; alokasi khusus; kemiskinan

Effect of fiscal decentralization on poverty level

Abstract

This study aims to see how the effect of fiscal decentralization on poverty in idistricts/cities in South Sulawesi Province. The objects of this research are poverty depth index data (P1), regional original income (PAD), general allocation funds (DAU), special allocation funds (DAK) and poverty depth index (P1) in 24 districts/cities of South Sulawesi Province with a range of time from 2011 to 2020. The data analysis technique uses panel data regression, by choosing the best model from the three panel data regression models, namely the common effect model, fixed effect model and random effect model. The model chosen from the Hasumant Test is the fixed effect model. The value of the coefficient of determination (R²) is 13.6 percent. By using a fixed effect model that is processed using the RStudio program, the results of the Regional Original Income (DAK) and Poverty have a negative direction and a significant effect, the General Allocation Fund (DAU) variable on the Poverty Level has a positive relationship direction and has an insignificant effect and The Special Allocation (DAK) on the Poverty Level has a negative direction and an insignificant effect.

Keywords: Fiscal decentralization; regional original income; general allocation funds; special allocations; poverty

PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan otonomi daerah mengakibatkan adanya perubahan fundamental terhadap korelasi antara pemerintah pusat serta daerah khususnya pada bidang administrasi juga pola hubungan antara pemerintah pusat serta daerah. Desentralisasi bisa didefinisikan menjadi transfer wewenang atau kekuasaan pada perencanaan publik, manajemen, dan pemusatan keputusan atau peraturan pada pemerintahan. Penerapan swatantra wilayah bertumpuh di dua dimensi yaitu desentralisasi administratif dan desentralisasi keuangan. ke 2 dimensi tersebut menunjukkan konsep serta arah berasal kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal ini pula sampai pada tingkat kabupaten serta kota bahkan hingga ketinggian desa. semenjak penetapannya, kebijakan ini telah menghadirkan asa baru bagi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kemandirian dan pengetasan kemiskinan bagi masyarakat (Daforsa & Handra, 2019).

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat membantu memperluas tugas-tugas publik dan efektivitas fungsional pemerintah lingkungan, memenuhi keinginan provinsi, mengembangkan lebih lanjut konstruksi keuangan secara komprehensif, dan mengumpulkan pendapatan teritorial dan publik, meningkatkan tanggung jawab, keterusterangan, dan menawarkan investasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, mengurangi celah moneter antar Pemerintah Daerah, menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang mendasar bagi individu di seluruh Indonesia, serta mendukung pengelolaan keuangan dalam pendekatan makroekonomi (Ridho, 2013). Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pedoman kemerdekaan wilayah yang diyakini adalah kemerdekaan provinsi yang seluas-luasnya sebagaimana yang diharapkan, tulus dan berwawasan serta yang dapat ditujukan untuk mengatasi batas wilayah guna mewujudkan perekonomian yang layak dan stabil serta untuk bekerja atas bantuan pemerintah daerah.

Desentralisasi fiskal memberi wewenang kepada otoritas publik untuk lebih menerima tujuan dan kecenderungan kebutuhan penduduk dibandingkan dengan pemerintah yang terkonsentrasi untuk membuat bantuan pemerintah kelompok. Namun, sebenarnya, banyak daerah di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mencapai kemampuan finansial untuk mendanai kebutuhan keuangan daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam rangka simpanan keseimbangan moneter diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa DAU dalam suatu ruang ditetapkan berdasarkan celah keuangan, dimana celah uang tersebut merupakan kebutuhan moneter. pendek batas moneter daerah. Kebutuhan aset untuk menyelesaikan kewajiban dan unsur pemerintah provinsi idealnya dapat diperoleh dari aset yang diklaim oleh daerah. Persyaratan aset untuk melakukan kewajiban pemerintah dikenal sebagai kebutuhan moneter, sedangkan cadangan yang diperoleh dari sumber yang dimiliki dan diangkat ke otoritas publik dalam istilah skolastik disebut sebagai batas keuangan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling utama dihadapi oleh setiap Daerah dan Negara, terutama dinegara Indonesia kemiskinan menjadi pusat utama pemerintah baik dari pusat hingga ke pelosok daerah-daerah. menurut badan pusat statistik kemiskinan adalah ketidak mampuan buat memenuhi kebutuhan dasar baik kebutuhan kuliner atau bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020).

Menurut badan pusat statistik Sulawesi Selatan yang terletak pada pulau Sulawesi berada pada peringkat ke 18 tertinggi se Indonesia yaitu sebesar 8,72 Persen. Jika dilihat dari data kemiskinan per kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar wilayahnya. Pendahuluan berisi uraian latar belakang permasalahan, isu-isu terkait dengan masalah yang diselesaikan, tinjauan atau uraian peneliti sebelumnya oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, motivasi dan tujuan pelaksanaannya.

Tabel 1. Persentase penduduk miskin dan kapasitas fiskal tahun 2020 menurut kabupaten/kota Sulawesi Selatan

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen) Tahun 2020	Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020
Kepulauan Selayar	12,48	0,653
Bulukumba	7,10	1,018
Bantaeng	8,95	0,708
Jeneponto	14,58	0,666
Takalar	8,44	0,454
Gowa	7,38	0,999
Sinjai	9,0	0,490
Maros	9,74	0,811
Pangkep	13,96	0,733
Barru	8,26	0,365
Bone	10,68	1,187
Soppeng	7,59	0,498
Wajo	6,95	0,370
Sidrap	5,05	1,844
Pinrang	8,86	0,659
Enrekang	12,17	0,645
Luwu	12,65	1,034
Tana Toraja	12,10	0,640
Luwu Utara	13,41	0,666
Luwu Timur	6,85	1,127
Toraja utara	12,01	0,750
Makassar	4,54	3,658
Pare-pare	5,44	0,711
Palopo	7,85	0,483
Sulawesi Selatan	8,72	0,799

Berdasarkan table 1, Menunjukkan bahwa secara umum presentase penduduk miskin dan kapasitas fisik 24 Kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan sangat beragam. Namun bisa dilihat, dengan kapasitas fisik yang tinggi pada suatu daerah belum tentu dapat menekan angka kemiskinan pada daerah tersebut. Ini dapat dilihat pada tabel 4 Kabupaten yakni Kabupaten Bulukumba, Bone, Luwu, dan Luwu Timur yang memiliki jumlah kapasitas fisik diatas 1 atau cukup tinggi kapasitas fisik yang dimiliki namun persentase penduduk miskin juga tergolong tinggi pula yakni masing-masing: 7,10%, 10,68%, 12,65% dan 6,85%. Dengan jumlah kapasitas fisik yang tinggi tentunya di harapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah masing-masing namun pada kenyataan bahwa kapasitas yang tinggi belum cukup kuat untuk menekan angka kemiskinan yang di miliki oleh daerah tersebut.

Pada dasarnya, upaya pengembangan keuangan daerah akan memunculkan satu sisi lagi yang harus diperhatikan oleh legislatif terdekat, masalah ini dianggap karena ketidakseimbangan pendapatan antar daerah yang dapat mendorong kesenjangan sosial antar kabupaten, menjadi kemiskinan khusus. (Ridho, 2013). Derajat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang bervariasi dari tahun ke tahun membuat otoritas publik lebih fokus pada upaya keringanan kebutuhan. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, penting untuk terlebih dahulu menyadari unsur-unsur apa yang mempengaruhi tingkat kebutuhan, sehingga pendekatan yang tepat dan kuat dapat dirinci untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Selatan. Sementara itu, awal mulanya bagian pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai acuan untuk melihat pameran pergantian wilayah.

Legislatif terdekat berperan signifikan dalam pembangunan keuangan dan pengurangan kemiskinan melalui kebijakan yang mereka miliki, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, berbagai daerah dengan berbagai tingkat kebijakan dan berbagai kemampuan fiskal belum mampu mengurangi kemiskinan secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemda Kabupaten/Kota belum ideal dalam mengkaji kemampuan keuangan daerah. Peningkatan laju perkembangan upah unik teritorial diharapkan dapat meningkatkan pergerakan keuangan dan berdampak pada penurunan tingkat kebutuhan di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimanapun, masih terdapat variasi yang terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

METODE

Jenis penelitian, menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang akan dipergunakan dipenelitian ini berupa jenis data sekunder yang berupa data panel, yaitu gabungan antara data time series untuk runtun waktu 2011-2020 serta cross-section data yang meliputi 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya, misalkan mengambil dari literatur, buku, jurnal, dan sebagainya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Lembaga pengumpulan data yaitu, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Pengujian dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan bantuan software Rstudio. Variabel yang akan diteliti terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (independent variable) terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan pengujian data menggunakan regresi data panel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama, melakukan pengujian kemudian mendapatkan hasil uji, bahwa tinjauan ini menganggap lebih cocok untuk menggunakan model Fixed Effect dibandingkan dengan model random effect, mengingat hasil dari uji Hausman di mana pengujian ini digunakan untuk menentukan model yang tepat antara model fixed effect dan model random effect. Hasil yang didapat adalah:

```
Hausman Test
data: POVERTY ~ PAD + DAU + DAK
chisq = 38.157, df = 3, p-value = 2.618e-08
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

Gambar 1. Hasil uji hausman

Berdasar kepada hasil uji Hausman didapatkan hasil berdasarkan nilai p-value = 2,618e-08 ini berarti bahwa hasil p-value lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, yang berarti bahwa hipotesis nol ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan adalah model fixed effect.

Uji asumsi klasik

Dapat dilihat hasil Multikolinieritas didapatkan nilai p-value < 2,2e-16 dan nilai ini lebih kecil daripada nilai tingkat kesalahan alfa 0,05 sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi atau terbebas dari adanya multikolinieritas.

```
> pbgtest(fixed)
Breusch-Godfrey/wooldridge test for serial correlation in panel models
data: POVERTY ~ PAD + DAU + DAK
chisq = 154.42, df = 10, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
```

Gambar 2. Hasil multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas, yang menggunakan metode White Heteroskedasticity yang dimana apabila nilai p-value lebih besar dari nilai tingkat kesalahan alfa yaitu sebesar 5%, maka dipastikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

```

> bptest(fixed)

          studentized Breusch-Pagan test

data: fixed
BP = 2.4083, df = 3, p-value = 0.4921

```

Gambar 3. Hasil uji heterokedastisitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh mendapatkan nilai p-value 0,4921 ini berarti nilai p-value lebih besar dibandingkan dengan nilai kesalahan alfa 5%. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi atau terdapat masalah heterokedastisitas.

Uji hipotesis

Berdasarkan hasil Uji F maka diperoleh nilai p-value sebesar 2,791e-07, yaitu hasil yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikan α sebesar 0,05 atau 5%. Berarti H_0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini dapat dilihat pada gambar.4

```

> summary(fixed)
Oneway (time) effect within Model

Call:
plm(formula = POVERTY ~ PAD + DAU + DAK, data = datapanel, effect = "time",
     model = "within", index = c("DAERAH", "TAHUN"))

Balanced Panel: n = 24, T = 10, N = 240

Residuals:
    Min.   1st Qu.   Median   3rd Qu.   Max.
-1.14697 -0.43948 -0.15086  0.40598  1.88111

Coefficients:
      Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
PAD -4.30906    0.81372  -5.2955 2.799e-07 ***
DAU  0.80466    0.49681   1.6196  0.1067
DAK -1.27933    1.46353  -0.8741  0.3830
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 110.01
Residual Sum of Squares: 95.03
R-Squared: 0.13615
Adj. R-Squared: 0.090483
F-statistic: 11.9256 on 3 and 227 DF, p-value: 2.791e-07

```

Gambar 4. Regresi data panel dengan iModel fixed effect

Berdasarkan hasil uji t menggunakan model yang terpilih didapatkan hasil bahwa, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dapat dilihat dari angka koefisien PAD sebesar -4,30906 dengan probabilitas t-statistik sebesar 2.799e-07 menunjukkan bahwa $p < 0,05$ ini disimpulkan bahwa hipotesis satu (H_1) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diterima.

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai DAU sebesar 0,80466 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,1067 dengan nilai probabilitas di atas nilai $\alpha = 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Dana Alokasi Umum terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditolak.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan. hal ini dapat dilihat dari nilai DAK didapatkan nilai sebesar -1,27933 dengan nilai probabilitas 0,3830 di atas nilai $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan bahwa sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Dana Alokasi Khusus terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien PAD sebesar -4,30906 dengan probabilitas t-statistik sebesar $2.799e-07$ menunjukkan bahwa $pr t < 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan yang parsial antara variabel independent dan dependen.

Dengan demikian semakin tinggi PAD yang diperoleh dan digunakan oleh pemerintah daerah pada 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan untuk kebijakan pengurangan angka tingkat kemiskinan dan pembangunan daerah. Dengan ini sejalan dengan pendapat (Sidik, 2002) dengan kemampuan daerah yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola, mengalih sumber-sumber keuangan daerah, khususnya melalui PAD yang digunakan untuk membiayai keuangan daerah. Wilayah yang mempunyai taraf Perkembangan PAD yang positif cenderung memiliki derajat perkembangan ekonomi yang lebih unggul. Dalam hal PAD lebih tinggi, aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih banyak dan tingkat otonomi provinsi juga akan lebih tinggi, oleh karena itu pemerintah daerah harus melangkah dan lebih menyelidiki kemungkinan kabupaten dan menetapkan penggunaan wilayah untuk meningkatkan keuangan daerah dan pembangunan melalui PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manek & Badrudin, 2017), menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan didukung oleh penelitian yang dilaksanakan Syamsul (2020), Sudewi dan Wirathi, (2013), Hutabarat, (2016). Ini berarti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan juga sejalan dengan penurunan kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dalam penelitian (Isramiwarti et al., 2017) mendapatkan hasil yang memperkuat penelitian ini, diketahui bahwa dampak Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap tingkat Kemiskinan dengan melalui Belanja daerah berpengaruh signifikan, hal ini dibuktikan dari nilai path koefisien sebesar 0.218 dengan nilai p-Value sebesar <0.001 yang berarti p-Value $< 0,05$ serta baku error sebesar 0.055. Hasil ini memberikan bahwa terdapat pengaruh antara Pendapatan asli daerah terhadap tingkat Kemiskinan Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Frans et al., 2017), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Selama waktu yang dihabiskan untuk meretas atau mengurangi kemiskinan membutuhkan aset yang dapat diakses, untuk otonomi moneter pemerintah provinsi yang dikenal sebagai penghasil pendapatan asli daerah yang menjadi sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung program pemerintah daerah otonom, misalnya, pengentasan kemiskinan, pendidikan hibah untuk keluarga yang tidak mampu secara finansial dan pengaturan kantor Kesehatan di daerah. Otonomi daerah juga dilihat dari pendapatan daerah yang diperoleh daerah karena kabupaten memiliki batas PAD yang layak, juga kebebasan dalam melakukan pembangunan juga akan besar, mengingat untuk mitigasi kebutuhan. Batas wilayah/wilayah perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang positif dengan tujuan bahwa pelaksanaan PAD yang layak juga akan berdampak baik terhadap penurunan pada kemiskinan.

Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemiskinan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai DAU sebesar 0,80466 dengan nilai probabilitas t sebesar 0,1067 dengan nilai probabilitas di atas nilai $\alpha = 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan Dana Alokasi Umum terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditolak.

DAU yang menjadi salah satu komponen pembiayaan daerah, besarnya Dana Alokasi umum (DAU) yang diterima oleh 24 wilayah Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dengan kecenderungan meningkat. Hal ini menyampaikan gambaran bahwa pemda Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan sangat tergantung dari pusat pada membiayai operasional daerahnya. Ini sejalan dengan pendapat (Adi (2012) dalam Isramiwarti et al., 2017), bahwa besaran DAU terhadap pendapatan asli daerah secara normal

masih paling tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan pendapatan provinsi lainnya, termasuk dari PAD yang dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, namun demikian pendapatan daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk tugas-tugas daerah dan bukan untuk penggunaan modal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan untuk bantuan pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Istimal, 2018), dimana Dana Alokasi Umum secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan kata lain bahwa angka kemiskinan tidak signifikan ketika terjadi penurunan atau peningkatan Dana Alokasi Umum. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paulus et al., 2019), yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dapat ditarik pengertian bahwa peningkatan jumlah dana alokasi umum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Dana Alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. hal ini dapat dijelaskan bahwa kemiskinan terkait sangat erat dengan ketimpangan kesejahteraan. Selanjutnya Langkah yang tepat untuk mengurangi ketimpangan baik kapasitas fiskal maupun pembangunan daerah dengan menyalurkan dana alokasi umum. Pemberian DAU ini dapat mengurangi ketimpangan antar daerah sehingga akan berdampak pada tingkat kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istimal (2012), dimana Dana Alokasi Umum secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan kata lain bahwa angka kemiskinan tidak signifikan ketika terjadi penurunan atau peningkatan Dana Alokasi Umum. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Paulus, Koleangan dan Engka tahun 2017, yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dapat ditarik pengertian bahwa peningkatan jumlah dana alokasi umum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengaruh dana alokasi khusus terhadap kemiskinan

Berdasarkan pengujian hipotesis Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan. hal ini dapat dilihat dari nilai DAK didapatkan nilai sebesar -1,27933 dengan nilai probabilitas 0,3830 diatas nilai $\alpha = 0,05$. Ini menunjukkan bahwa sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan Dana Alokasi Khusus terdapat hubungan yang signifikan dan positif terhadap Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditolak.

Penelitian ini berbanding terbalik dengan dengan penelitian yang dilakukan (Widianto et al., 2016), yang mengemukakan hasil penelitian bahwa dana alokasi khusus (DAK) memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Paulus et al., 2019), mendukung penelitian ini dengan menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Ini menandakan bahwa besarnya dana alokasi khusus yang diterima oleh pemerintah daerah tidak dapat mengurangi jumlah penduduk miskin secara nyata pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi selatan. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Konny Joula Ellen Rasu, Anderson G. Kumenaung, 2019), dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado, mendapatkan hasil bahwa Dana Alokasi khusus berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap kemiskinan ialah bila dana lokasi khusus meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan akan tetapi tidak signifikan.

Selain itu, porsi DAK dari pemerintah pusat ke daerah harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah-masalah seperti berkurangnya kesenjangan dalam pembagian gaji, penataan kantor kesehatan, pendidikan dan belum dimanfaatkan secara ideal untuk masalah kemiskinan. dalam berkonsentrasi pada strategi pemerintah daerah yang mengarah pada pengelolaan kebutuhan, hal ini ditujukan pada upaya untuk membangun Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu permasalahan publik yang harus dipandang yang mengharapkan untuk bekerja pada kualitas manusia untuk meringankan masalah dari kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian ini maka ditarik kesimpulan sebagai bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak

signifikan dan positif terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk pihak pemerintah yang berfungsi dan menjadi pemegang kekuasaan serta aturan perlu untuk mempertimbangkan serta mempertahankan masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan serta memperbaiki arah kebijakan untuk merumuskan aturan yang dihasilkan sebagai akibatnya tercipta efisiensi serta kemandirian fiskal setiap daerah.

Diharapkan para pelaku pemegang kebijakan mampu merumuskan kebijakan anggaran yang sempurna serta mempertinggi pendapatan asli daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota dan ini bisa pada tutupi sang aturan pemerintah sentra dan memaksimalkan asal daya yang dimiliki kabupaten/kota pada Provinsi Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R. (2021). Universitas Sumatera Utara Poliklinik Universitas Sumatera Utara (Pp. 1–88).
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima. In Arsyad (Ed.), UPP STIM YKPN (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- BPS. (2020). Badan Pusat Statistik.
- Daforsa, F., & Handra, H. (2019). Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 6(6), 717–728.
- Frans, D., Rahayu, S., Putra, D., & Mahardika, K. (2017). The Influence Of Local Government Revenue , Percapita Income , Education Level On Level Poverty (Empiric Study On City In West Java Province During 2011-2015). 4(2), 1666–1675.
- I Made Anom Iswara, I. G. B. I. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali Tahun 2006 - 2011. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(11), 12–26.
- Istramiwanti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.
- Istimal, I. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan Di Kota Tangerang. *Liquidity*, 1(1), 59–66.
- Juli Panglima Saragih, M. S. K. (2003). Desentralisasi fiskal dan keuangan daerah dalam otonomi (Ghalia Indonesi (ed.)). Ghalia Indonesi.
- Konny Joula Ellen Rasu¹, Anderson G. Kumenaung², R. A. M. K. (2019). Kemiskinan di Kota Manado. *Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 12–25.
- Manek, M., & Badrudin, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 17(2), 81–98.
- Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 - 2012. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1.
- Meilen Greri Paseki, Amran Naukoko, P. W. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3), 30–42.

-
- Mudrajad Kuncoro. (1997). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masala dan Kebijakan* (Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN d/h AMP YKPN (ed.); Edisi Keem). Yogyakarta. Kuncoro, M.Soc, Sc
- No 32 Undang-Undang. (2004). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. In tentang pemerintahan daerah.
- Nurul Hidayah, H. S. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah Nurul Hidayah & Hari Setiyawati. XVIII(01), 45–58.
- Paat, D. C., Koleangan, R. A. M., & Rimate, V. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–10.
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–18.
- Ridho, A. (2013). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Repository*, 2, 1–89.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Seminar “Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia,” 33, 1–24.
- Widianto, A., Sedyu, U., & Langgeng Nurmansyah, A. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, Vol. 5(No. 2), 170–176.